

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA PERUSAHAAN BUMN (PERSERO) DI INDONESIA**

Susi Handayani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unesa

Email: susihandayani_76@yahoo.com

Artikel diterima: 14 Desember 2012

Terakhir direvisi: 26 Januari 2013

Abstract

Corporate sustainability is characterized by an increase in the value of the company is reflected in the achievement of profit targets. One of the obstacles faced in achieving this goal is the conflict of interest between management and shareholders. Corporate Governance is an effective mechanism to minimize agency conflicts, with emphasis on legal and ethical aspects to encourage the growth of the company's performance. The purpose of this study is to empirically examine the effect of corporate governance on financial performance.

This research is a quantitative study using a dependent variable corporate governance that is proxied by the meeting's activities the board of commissioners, the number of board of directors, the proportion of independent board, as well as the number of audit committee. Financial performance as the dependent variable is measured using the cash flow rate of return on assets (CFROA). CFROA calculated from earnings before interest and taxes plus depreciation divided by total assets. The sample used in this study were 12 BUMN that publish their financial statements during the period 2007-2012. The results showed that the activity of the board of commissioners meeting and audit committee size has no effect on financial performance. While the size of the board of directors and board size are independent has effect on financial performance.

Keywords: *Corporate governance, board of directors, independent board, the audit komite*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan perusahaan ditandai dengan peningkatan nilai perusahaan yang tercermin dalam pencapaian laba yang ditargetkan. Melalui laba tersebut, perusahaan mampu memberikan deviden dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut adalah konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (*agency relationship*). Dalam hal ini perusahaan perlu untuk menciptakan kepercayaan pada investor bahwa dana ekstern telah digunakan secara efektif dan efisien dengan memastikan bahwa manajemen telah bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Hal ini didasari karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor (*agency theory*) yang menyatakan bahwa sebagai

manusia, manajer mungkin akan bertindak untuk mengutamakan kepentingan pribadi, karena lebih banyak mengetahui informasi internal dan ekspektasi masa depan mengenai perusahaan dibandingkan dengan investor. Ketidakseimbangan informasi ini memunculkan asimetri informasi.

Corporate Governance merupakan mekanisme yang efektif untuk meminimalisasi konflik keagenan, dengan menekankan pada aspek legal dan etika untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan. *Corporate governance* secara umum merupakan seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan dan pilihan manajer dengan kepentingan *shareholders*, karena pada hakekatnya *corporate governance* merupakan perimbangan yang harmonis antara pemilik dan pengelola perusahaan yang didasarkan pada lima prinsip utama yaitu *fairness, transparency, accountability, independency*, dan *responsibility* (Susanti; 2011). Prinsip-prinsip tersebut juga telah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Dalam peraturan tersebut, BUMN diwajibkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasional. Hal ini dikarenakan BUMN sebagai salah satu roda perekonomian Indonesia, dituntut mengambil langkah komprehensif terhadap aset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah (*value added*) (Sitompul; 2008).

Isu mengenai *Corporate Governance* meningkat bersamaan saat terbukanya skandal keuangan berskala besar pada tahun 2001-2002. Perusahaan seperti Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing melibatkan akuntan sebagai salah satu elemen penting dalam *Corporate Governance*. Di Indonesia, perusahaan seperti PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk juga terdeteksi timbulnya manipulasi pelaporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu produk manajemen yang diharapkan mampu meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban kinerja manajemen, sehingga pihak investor dapat mengukur, mengawasi, dan menilai usaha manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Profitabilitas dalam laporan laba rugi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan operasional perusahaan. Hanya saja seringkali laporan tersebut dipengaruhi oleh pemilihan metode akuntansi, sehingga laba yang dihasilkan belum tentu mencerminkan ketersediaan likuiditas. Sedangkan laporan arus kas menunjukkan hasil tunai operasional perusahaan yang telah mengeluarkan unsur beban. *Cash Flow Return On Assets* (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al dalam Sam'ani; 2008).

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Dalam penelitian ini memfokuskan pada BUMN persero. Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal

atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Tabel 1. Kinerja BUMN selama tahun 2005-2009

Tahun	Total BUMN	BUMN Laba	BUMN Rugi
2009	141	117	24
2008	142	114	27
2007	139	108	31
2006	139	100	39
2005	139	103	36

Sumber: <http://www.bumn.go.id/kinerja-bumn/laba-rugi/>

Sementara itu menurut Kusuma (2012), membandingkan capaian riil atas laba bersih antara Pertamina (persero) dan Petronas. Setiap tahunnya, Pertamina setidaknya mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp 22 triliun atau tidak lebih dari Rp 24 triliun. Sedangkan Petronas mampu menghasilkan laba bersih hingga di atas Rp 200 triliun per tahun. Malaysia sendiri masih menerapkan BBM bersubsidi seperti yang disediakan pula oleh Pertamina. Selain itu, Petronas bukan saja mampu membangun menara kembar namun juga menjadi sponsor tetap dalam ajang balap otomotif seperti Formula One dan GPMotor.

Adanya skandal di tahun 2001-2002 yang mencakup di dalamnya perusahaan BUMN (PT Kimia Farma) dan kinerja BUMN persero yang masih mengalami kerugian, tidak selaras dengan tujuan *Good Corporate Governance* yang menekankan pada kepentingan pemegang saham. Untuk itu penelitian ini mencoba mengkaji pentingnya peranan *Corporate Governance* dalam penentuan kinerja perusahaan BUMN persero. Pemilihan persero dilandasi karena maksimal 49% saham dimiliki oleh nonpemerintah. Sehingga persero seharusnya telah berorientasi untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penciptaan laba.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien (Sam'ani; 2008). Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan mengenai hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan. Darmawati, dkk (2004) menunjukkan bahwa dalam penelitian Daily, dkk (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) tidak terdapat hubungan antara *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan. Di sisi lain, Black dkk., 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; Darmawati dkk., 2004; dan Sam'ani, 2008 menyatakan adanya hubungan positif antara *Corporate Governance* dan kinerja manajemen.

Komponen GCG dalam penelitian ini adalah aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Dewan komisaris harus bersifat independen, dalam pengertian bahwa Dewan komisaris harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan

tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Aktivitas tersebut dalam penelitian ini tercermin dalam banyaknya jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris. Selama ini belum ada penelitian yang menjadikan aktivitas dewan komisaris sebagai komponen GCG pada BUMN. Sehingga variabel ini merupakan variabel baru dalam pengukuran GCG.

Ukuran dewan direksi, dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen, 1993; Lipton and Lorsch, 1992; Yermack, 1996). Dalton et al. (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al. (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia sebagaimana ditulis dalam Sam'ani (2008).

Pada komponen proporsi dewan komisaris independen, penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, 1990), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991) sebagaimana dikutip dalam Sam'ani (2008).

Selanjutnya, pada komponen ukuran komite audit, penelitian mengenai komite audit ada yang mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek *corporate governance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Mayangsari (2003) meneliti pengaruh keberadaan komite audit terhadap integritas laporan keuangan, disimpulkan bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Sedangkan Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian (Sam'ani; 2008).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN di Indonesia?

KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG)

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Sam'ani; 2008). *Stewardship theory* dibangun atas dasar asumsi sifat dasar manusia yakni pada hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Dengan kata lain teori ini memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya ataupun pemegang saham pada khususnya. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana yang di asumsikan oleh *stewardship model*. Sehingga terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan yakni, masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002).

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sam'ani;2008)). Penelitian Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba.

Di sini dibutuhkan peran *Corporate Governance* yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut Sam'ani (2008) dalam konteks perusahaan, istilah *corporate governance* disamakan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.

Menurut Sitompul (2008), *Corporate Governance* juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong :

- a. Pertumbuhan kinerja perusahaan.
- b. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif.

- c. Pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi secara harmonis dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Terdapat enam hal tujuan dari penerapan GCG pada BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN, antara lain:

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelesatarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien (Sam'ani; 2008). Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan mengenai hubungan antara *Good Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan.

Darmawati, dkk (2004) menunjukkan bahwa dalam penelitian Daily, dkk (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) tidak terdapat hubungan antara *Corporate Governance* dan kinerja perusahaan. Di sisi lain, Black dkk., 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; Darmawati dkk., 2004; dan Sam'ani, 2008 menyatakan adanya hubungan positif antara *Corporate Governance* dan kinerja manajemen.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan elemen penting yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada Dewan direksi. Terdapat dua peran utama dewan komisaris menurut FCGI, 2002, yaitu melakukan fungsi servis dan fungsi kontrol. Fungsi servis berarti bahwa dewan komisaris mampu memberikan nasihat dan konsultasi kepada manajemen. Sedangkan fungsi kontrol dilakukan mewakili mekanisme internal dalam mengawasi perilaku manajemen yang cenderung *opportunistic*, sehingga dewan direksi berperan dalam menyelaraskan kepentingan investor dan manajemen.

Dewan komisaris harus bersifat independen, dalam pengertian bahwa Dewan komisaris harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai

untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

H₁ : Aktifitas (rapat) dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya keberadaan dewan direksi kemudian menimbulkan pertanyaan jumlah ideal yang dibutuhkan. Dalam Sam'ani; 2008 menyebutkan bahwa jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Mintzberg, 1983). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Jensen, 1993; Yermack, 1996).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen, 1993; Lipton and Lorsch, 1992; Yermack, 1996). Dalton et al. (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al. (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia sebagaimana ditulis dalam Sam'ani (2008). Mengingat fungsi dewan direksi, maka penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja

Dewan Komisaris Independen

Menurut Sam'ani (2008), Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan

dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness*).

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya sekaligus “*the interest of the whole company*”. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas untuk memonitoring jalannya operasi perusahaan (Rahmawati, 2010).

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson, 1990), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991; Goodstein & Boeker, 1991) sebagaimana dikutip dalam Sam’ani (2008).

H₃ : Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Komite Audit

Pengertian komite audit dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada Peraturan nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit berperan dalam melakukan review terhadap proses data finansial dan review pengendalian internal.

Penelitian mengenai komite audit ada yang mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek *corporate governance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Mayangsari (2003) meneliti pengaruh keberadaan komite audit terhadap integritas laporan keuangan, disimpulkan bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Sedangkan Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian (Sam’ani; 2008). Sehingga hipotesa keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dengan kinerja perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya hasil penelitian Daily et al (1998), Kakabadse et al (2003) dan Young (2003).

Sementara Gompers et al (2003) serta Maher dan Anderson (2001) menemukan adanya hubungan positif antara *Corporate Governance* dengan kinerja keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, Faccio dan Ameziane (1999), Kang dan Asghar (2000), Lastanti (2004), Ana (2004), dan Wulandari (2005) menemukan hubungan positif antara keberadaan dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit dalam menentukan kinerja perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif, dimana penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Aktifitas dewan komisaris merupakan jumlah rapat dewan komisaris perusahaan (Beiner *et al*, 2003). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Aktifitas dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah rapat dewan komisaris suatu perusahaan. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat serta bertindak independen. Dewan Direksi diukur dengan jumlah anggota Dewan Direksi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2004). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit. Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN persero. Jumlah BUMN persero sampai tahun 2012 ada 140, yang merupakan besarnya populasi dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN persero yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: 1. BUMN sampai periode tahun 2012 dan BUMN yang go public dan mempublikasikan laporan keuangannya selama periode 2007-2012.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan BUMN persero periode 2007-2012 yang dipublikasikan untuk umum. Data penelitian yang mencakup data BUMN persero periode 2007-2012 yang mengalami kerugian maupun yang mencapai laba. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa annual report BUMN persero yang go publik dan yang dipublikasikan. Data laporan keuangan data *cross section* dari semua jenis perusahaan yang diambil dan data *time series* untuk tahun 2007-2012.

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode penggabungan (*pooling data*) merupakan model yang diperoleh dengan mengkombinasikan atau mengumpulkan semua data. Analisis regresi linear berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Pengujian Hipotesis pengaruh mekanisme *corporate governance* dan terhadap kinerja (H1, H2, H3, H4) digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

$$CSROA = \beta_0 + \beta_1 \text{RAPAT} + \beta_2 \text{DIR} + \beta_3 \text{INDEP} + \beta_4 \text{AUD} + \varepsilon$$

Dimana:

CSROA = *Cash Flow Return on Assets*

RAPAT = Aktivitas (rapat) Komisaris

DIR = Ukuran Direksi

INDEP = Ukuran Dewan Komisaris Independen

AUD = Komite Audit

β_0 = Konstanta

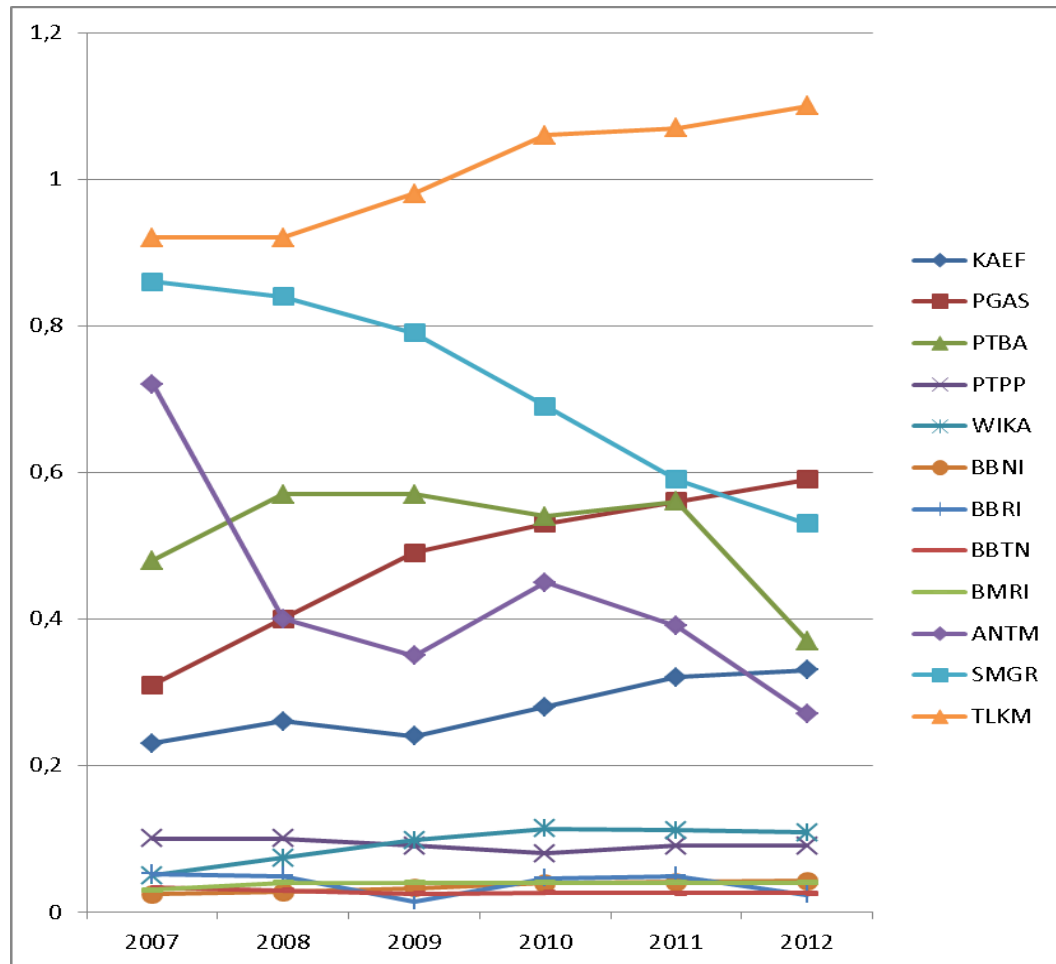
$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi

ε = *error*

HASIL

Sampel yang digunakan dalam penelitian sejumlah 12 BUMN: PT Kimia Farma Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Semen Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan *Cash Flow Return On Assets* (CFROA) yang merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan

yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al dalam Sam'ani; 2008).



Sumber: Data diolah penulis

Gambar 1. Grafik hasil pengukuran kinerja (CFROA) BUMN 2007-2012

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa terdapat beberapa BUMN yang mempunyai kinerja semakin meningkat yaitu: PT Kimia Farma, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Perusahaan Gas Negara, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan BUMN yang mempunyai kinerja semakin menurun adalah: PT Bank Mandiri, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Semen Indonesia. Sehingga dengan demikian 58,33% BUMN mengalami peningkatan kinerja. Sedangkan sisanya 41,67% masih mengalami penurunan kinerja.

Jika dilihat pada setiap jenis industri maka yang mengalami peningkatan kinerja adalah industri Farmasi, Energi, Konstruksi, dan Telekomunikasi.

Sedangkan Perbankan, Pertambangan dan Semen mengalami kinerja yang semakin menurun dari tahun 2007-2012.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Keterangan	Min	Max	Mean	Standar Deviation
Aktivitas rapat dewan komisaris	11	36	21,2	7,21
Ukuran dewan direksi	4	7	5,8	0,805
Ukuran dewan komisaris independen	1	7	4,233	1,45
Ukuran komite audit	3	7	4,267	1,142
CSROA	23	86	48,367	17,75

Sumber: data diolah penulis

Dari hasil statistik terlihat bahwa kinerja rata-rata BUMN adalah 48,37. *Cash Flow Return On Assets* (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al dalam Sam'ani; 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa aktiva BUMN mampu menghasilkan laba senilai 48,37%. Kinerja terendah ada pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk di tahun 2007, dan tertinggi pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2009.

Hasil Uji F

Tabel 4.6
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5005.241	4	1251.310	7.571	.000 ^a
	Residual	4131.725	25	165.269		
	Total	9136.967	29			

a. Predictors: (Constant), Audit, Indep, Dir, Rapat

b. Dependent Variable: CSROA

Sumber: hasil olahan SPSS

Dari tabel 4.5 tersebut nilai $F < 0,05$, maka secara bersama-sama, seluruh variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis (tabel 4.4) diperoleh nilai *adjusted R*² sebesar 0,548, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen bisa menjelaskan sebesar 54,8% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 45,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar model persamaan regresi.

PEMBAHASAN

Hubungan aktivitas dewan komisaris terhadap kinerja keuangan

Koefisien aktivitas dewan komisaris adalah $0,145 > 0,05$ sehingga diartikan bahwa aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh partisipasi secara tidak langsung dari pemerintah untuk mengendalikan fungsi *corporate governance*, terutama pada fungsi dewan komisaris. BUMN dengan bentuk persero, 51% saham dimiliki oleh pemerintah, sehingga secara tidak langsung, dalam aktivitas dan keputusan rapat dikendalikan oleh pemerintah. Dengan demikian intervensi pemerintah secara politis mempengaruhi keputusan rapat.

Selain itu, dalam rangka pengendalian aktivitas dewan komisaris tersebut, partisipasi pemerintah dapat berupa beberapa peraturan pemerintah mengenai fungsi dewan komisaris. Sebagai contoh pada Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Keputusan Menteri BUMN KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-09 /MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada BUMN. Peraturan-peraturan tersebut telah menyebutkan dengan jelas fungsi dan tugas dewan komisaris, sehingga secara tidak langsung keberadaan dewan komisaris telah diatur secara rinci dan dengan demikian tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN.

Hubungan ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan

Koefisien ukuran dewan direksi adalah $0,000 < 0,05$ sehingga diartikan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi akan meningkatkan kinerja keuangan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Sam'ani (2008) menyebutkan bahwa jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Mintzberg, 1983). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Hubungan ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan

Koefisien ukuran dewan komisaris independen $0,035 < 0,05$ sehingga diartikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris independen akan mengurangi kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen, 1993; Lipton and Lorsch, 1992; Yermack, 1996).

Di sisi lain, Sylvia dan Sidharta (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei *Asian Development Bank* dalam Boediono Gideon (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. Keberadaan komisaris independen ini tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring yang dijalankan oleh komisaris. Selain itu, komisaris utama yang cenderung dapat mengatur keefektifan seluruh tugas dan fungsi dewan komisaris masih merupakan komisaris yang tidak independen. Dari beberapa komisaris independen yang ada pun, tidak semua komisaris independen memiliki waktu dalam rangka memberikan fokus pengawasan terhadap kinerja manajerial. Hal ini terlihat dari proporsi kehadiran rapat komisaris, dimana komisaris independen tidak secara keseluruhan menghadiri rapat dewan komisaris. Aktifnya peranan Dewan Komisaris dalam praktek memang sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam beberapa kasus memang ada baiknya Dewan Komisaris memainkan peranan yang relatif pasif, namun di Indonesia sering terjadi anggota Komisaris Independen bahkan sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap Dewan Direksi. Komisaris independen seringkali dianggap tidak memiliki manfaat. Hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya (sehingga dalam banyak kasus, Dewan Komisaris juga gagal untuk mewakili kepentingan *stakeholders* lainnya selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas).

Hubungan komite audit terhadap kinerja keuangan

Komite audit berkoefisien $0,963 > 0,05$ dengan demikian bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) yang menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit berperan dalam melakukan review terhadap proses data finansial dan review pengendalian internal. Ukuran komite audit tidak berpengaruh, hal ini bukan berarti bahwa keberadaan komite audit tidak diperlukan, namun karena komite audit dibentuk dan berada dalam pengawasan dewan komisaris, sehingga kualitas kinerja komite audit bergantung pada kinerja dewan komisaris perusahaan. Dengan demikian pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan belum bisa terbaca jelas, karena kinerja komite audit berada dalam pengawasan dan pengendalian dewan komisaris.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN. Hal ini dapat disebabkan oleh partisipasi secara tidak langsung dari pemerintah untuk mengendalikan fungsi *corporate governance*, terutama pada fungsi dewan komisaris. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN. Ini menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMN. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit. Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN, karena komite audit dibentuk dan berada dalam pengawasan dewan komisaris, sehingga kualitas kinerja komite audit bergantung pada kinerja dewan komisaris perusahaan. Dengan demikian pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan belum bisa terbaca jelas, karena kinerja komite audit berada dalam pengawasan dan pengendalian dewan komisaris.

Saran

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disarankan beberapa hal bagi perusahaan:

- a. BUMN berbentuk persero, seharusnya dewan komisaris dapat difungsikan sebagaimana mestinya, yaitu melaksanakan fungsi servis dan kontrol perusahaan. Selanjutnya pemerintah sebaiknya mempercayakan fungsi tersebut, sehingga independensi dewan komisaris dapat dipertanggungjawabkan.
- b. BUMN mempertimbangkan proporsi dewan komisaris independen yang optimal disesuaikan dengan fungsi dan keahlian. Selain itu pembentukan dewan komisaris tersebut tidak hanya sekedar untuk memenuhi peraturan perundangan tapi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen.
- c. Diharapkan agar kinerja komite audit bersifat independen sehingga tidak tergantung pada kinerja dewan komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Baysinger, B., Kosnik, R. D., & Turk, T. A. 1991. Effects of board and ownership structure on corporate R&D strategy. *Academy of Management Journal*, 34: 205-214
- Black, B. S., H. Jang, dan W. Kim. 2003. Does Corporate governance Affect Firms' Market Values? Evidence from Korea. *Working Paper (April)*.
- Boediono, Gideon SB., 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Artikel yang Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8 Solo tanggal 15 - 16 September 2005*
- Bugshan, Turki, 2005, Corporate Governance, Earning Management and the Information Content of Accounting Earnings, Theoretical Model and Empirical Tests, *A Dissertation*, Bond University Queensland, Australia
- Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. (2006). *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*. <http://papers.ssrn.com/>
- Darmawati, D. et al., 2004, Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar*
- Effendi, M. Arief, 2005, Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 1, No. 1, Jakarta.
- <Http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/02/24/EB/mbm.20030224.EB85328.id.html>
- Jensen, M.C., and W. H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3, 305-360.
- Lipton, M., Lorsch, J., A Modest Proposal for Improved Corporate Governance", *Business Lawyer*. Vol. 48, Issue 1, Nov92, pp. 59-78.
- Mayangsari, S. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Makalah SNA VI*, hlm. 1255-1273.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. 1978. *The External Control Of Organizations*. New York: Harper & Row
- Rahmawati. 2006. Model Penelitian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perbankan. *Artikel yang Dipresentasikan pada Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi FE-UNS tanggal 27 Mei 2006*
- Sam'ani. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Yermack, D., 1996. Higher Market Valuation of Companies with Small Board of Directors. *Journal of Financial Economics* 40, 185-211.